

**PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG CALON
INDEPENDEN DALAM PILKADA TAHUN 2008
DI SUMATERA BARAT**
(Analisis Framing Tentang Calon Independen Dalam Pilkada
Tahun 2008 Pada Harian Padang Ekspres Dan Harian
Singgalang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

Oleh :

**KARTIKA DWI PUTRI
04193049**



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

ABSTRAK

KARTIKA DWI PUTRI

04 193 049

PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG CALON INDEPENDEN
DALAM PILKADA TAHUN 2008 DI SUMATERA BARAT (ANALISIS
FRAMING TENTANG CALON INDEPENDEN DALAM PILKADA TAHUN
2008 PADA HARIAN PADANG EKSPRES DAN HARIAN SINGGALANG)

Pembimbing I Dra. Fitri Adona, M. Si dan Pembimbing II Drs. Syaiful, M. Si

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan *frame yang* dikonstruksi media massa terhadap pemberitaan tentang calon independen dalam pilkada tahun 2008 di Sumatera Barat, serta menjelaskan kebijakan redaksional dan menjelaskan pola pemberitaan Harian Padang Ekspres dan Harian Singgalang. Melalui analisis *framing* yang digunakan dalam penelitian ini, dapat tergambar *frame* yang dikonstruksi oleh Harian Padang Ekspres dan Harian Singgalang terhadap pemberitaan calon independen dalam pilkada tahun 2008 di Sumatera Barat pasca keputusan MK. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan menerapkan analisis *framing* Robert N. Entman yang difokuskan pada teks berita dan didukung oleh informasi tentang manajemen redaksional (produksi berita).

Hasil penelitian terhadap teks yang disajikan Harian Padang Ekspres dan Harian Singgalang menunjukkan adanya perbedaan *frame* yang diangkat oleh kedua media ini. *Frame* yang ditunjukkan Harian Padang Ekspres adalah calon independen berpeluang untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Sedangkan Harian Singgalang menunjukkan *frame* yang diperlukannya aturan lebih lanjut tentang calon independen dalam hal ini diperlukan UU atau PP.

Kedua media massa lokal Sumatera Barat ini, telah menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial terhadap dinamika perpolitikan di daerah. Hal ini tercermin dari tindakan Harian Padang Ekspres dan Harian Singgalang dalam menyajikan pemberitaan calon independen dalam pilkada tahun 2008 di Sumatera Barat pasca keputusan MK dengan cukup intens. Sehingga dengan pemberitaan yang cukup intens dapat dilihat kecenderungan dari Harian Padang Ekspres dan Harian Singgalang yang dapat diidentifikasi dari hasil konstruksi pemberitaan, kebijakan redaksi dan pola pemberitaan dari Harian Padang Ekspres dan Harian Singgalang tentang calon independen dalam pilkada tahun 2008 di Sumatera Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Media massa merupakan salah satu saluran komunikasi politik yang digunakan sebagai wadah bagi publik untuk menyampaikan pesan mereka kepada lembaga-lembaga politik, atau sebaliknya sebagai wadah bagi lembaga-lembaga politik untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan mereka kepada publik. Media massa dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Pemberitaan yang dilakukan oleh media massa dalam berbagai proses politik yang ada telah menjadi bagian terpenting dalam berjalannya sebuah sistem politik¹. Dalam sebuah sistem politik, media massa sebagai salah satu saluran komunikasi politik melayani seluruh fungsi-fungsi politik (sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi, dan penggabungan)².

Salah satu bagian dari media massa adalah pers. Menurut Wilbur Schramm (1973)³, Pers adalah pengamat, forum dan guru (*watcher, forum, teacher*). Pers harus memberikan laporan, ulasan mengenai kejadian, menyediakan tempat, (forum) bagi masyarakat untuk mengeluarkan pendapat. Walaupun pada dasarnya sikap pers sangat dipengaruhi oleh nilai, filsafat hidup

¹ Marwadi rauf dan Mappa Nasrun, *Indonesia dan Komunikasi Politik*, 1993, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 1

² Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 223

³ Nuruddin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 70

dan ideologi suatu negara⁴, dan posisi sosio-politik-ekonomi pers menghubungkan tiga kuasa yaitu kuasa masyarakat, kuasa negara dan badan kuasa modal.

Dalam menjalankan perannya sebagai saluran komunikasi politik dalam sebuah sistem politik, media massa (media cetak) memiliki dua peran yaitu : Peran pertama, peran yang pada intinya pers menempatkan diri sebagai saluran atau cermin dari pihak yang diwakili aspirasinya, dan peran kedua pers sebagai wakil publik, pengkritik pemerintah, pendukung dan pembuat kebijakan⁵. Pada saat ini pengkontruksian realitas media terhadap berbagai isu politik semakin menjadi suatu bagian yang penting dalam pemberitaan. Pengkontruksian realitas tersebut dilakukan melalui penggunaan simbol-simbol politik (*language of politic*), melaksanakan strategi pengemasan pesan (*framing strategies*) dan melakukan fungsi agenda media (*agenda setting function*)⁶.

Pada saat media melakukan tindakan tersebut sebuah media bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan sebuah kekuatan politik tertentu, dan faktor eksternal berupa tekanan pasar pembaca, sistem politik yang berlaku dan kekuatan-kekuatan luar lainnya⁷, sehingga peristiwa politik yang dikonstruksi akan menghasilkan opini publik yang berbeda-beda tergantung kepada cara masing-masing media melaksanakan tiga tindakan tersebut, termasuk keberpihakan media massa

⁴ Ibid

⁵ Denis Mc Quail, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta : Erlangga, 1989, Hal. 10

⁶ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa : Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*, Jakarta : Granit, 2004 hal. 2

⁷ Ibid

terhadap kandidat dalam pilkada, misalnya calon independen dalam pilkada tahun 2008 di Sumatera Barat.

Opini tentang calon independen sudah menjadi perdebatan di media massa. Mencapai klimaks sewaktu Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan *judicial review* UU NO. 32/2004 tentang keikutsertaan calon independen dalam pilkada. Mahkamah Konstitusi memutuskan, bahwa pencalonan perseorangan dalam pilkada tidak bertentangan dengan UUD 1945. Secara implisit UUD 1945 memberikan kesempatan yang lebih terbuka untuk menjadi calon kepala daerah. Kesempatan itu dapat dibaca dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang tidak mengharuskan calon kepala daerah berasal dari partai politik. Untuk menghindari kekosongan hukum, sebelum ada undang-undang yang mengatur syarat dukungan bagi calon perseorangan, MK berpendapat, KPU dapat menggunakan Pasal 68 ayat 1 UU Pemerintahan Aceh sebagai acuan.

MK menilai pasal-pasal tertentu dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membatasi hak-hak berpolitik setiap warga negara sebagaimana dijamin UUD 1945. Dengan adanya kehadiran calon perseorangan semestinya dapat dipandang sebagai penyempurnaan sistem politik Indonesia. Karena pembatasan calon perorangan di luar partai politik merupakan reduksi yang dapat menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara. Jika pencalonan perorangan di luar parpol dimungkinkan, maka akan teruji sejauh mana apresiasi publik atas eksistensi parpol. Dengan berbagai argumen itu, ada baiknya partai politik membuka diri atas munculnya calon perorangan. Dengan hadirnya calon perorangan, maka parpol justru akan terdorong untuk semakin berbenah diri dan

dapat mengevaluasi dirinya secara terus menerus, sehingga dapat semakin diterima dan mendapatkan kembali kepercayaan publik. Hal inilah yang menyebabkan Peneliti tertarik untuk menafsirkan keberpihakan media massa terhadap calon independen khususnya dalam pilkada di beberapa kota yang akan berlangsung tahun 2008 ini di Sumatera Barat.

Media massa lokal sangat gencar sekali memberitakan calon independen dalam pilkada Sumbar 2008. Hal yang paling penting adalah media massa harus mampu memberitakan hal ini secara kritis dan proporsional. Di Sumatera Barat pemberitaan mengenai calon independen dalam pilkada Sumbar tahun 2008 juga tidak luput dari perhatian media massa. Sebagai bukti, permasalahan calon independen dalam pilkada Sumbar 2008 telah mengisi berbagai media cetak baik harian maupun mingguan di Sumatera Barat secara intens⁸.

Begitupun dengan dua harian Sumatera Barat yaitu Harian Padang Ekspres dan Harian Singgalang. Pemberitaan mengenai calon independen walikota Padang, Pariaman, Padang Panjang dan Sawahlunto dalam pilkada 2008 sangat kuat dan gencar diberitakan oleh media cetak harian di Sumatera Barat pada bulan Juni-Juli 2007. Dari empat daerah yang ikut dalam pemilihan Kepala Daerah Sumatera Barat hanya kota Padang yang ada dan lolos calon pendennya sampai proses pemilihan kepala daerah. Berikut daftar calon kota dan calon wakil walikota Padang:

⁸ Minat peneliti terhadap Harian Pagi Padang Ekspres dan Harian Singgalang dari tanggal 4 Juni hingga 31 Juli 2007

Tabel 1.1

**DAFTAR CALON WALIKOTA DAN
CALON WAKIL WALIKOTA PADANG**

NAMA	PARTAI/CALON INDEPENDEN
1.Fauzi Bahar-Mahyeldi Ansharullah	PAN dan PKS
2.Yusma Kasim-Yulahyari Sastra	Partai Persatuan Pembangunan dan PDI Perjuangan
3.Jasrial-Mukhlis Sami	Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang
4.Ibrahim-Murlis Muhammad	Calon Independen
5.Mudrika-Danil Aswad	Calon Independen

(Sumber: www.Tempointeraktif.com/hg/nusa/2008/09/08/brk, 15 November 2008, 10.47 am)

Dari 5 pasang calon walikota dan calon wakil walikota Padang hanya 2 pasang calon independen yang ikut dalam pemilihan kepala daerah kota Padang. Sedangkan calon yang diusung dari partai politik terdiri dari 3 pasang. Untuk lebih jelasnya Peneliti menambahkan data pembandingan dari pemberitaan yang berkaitan dengan calon non-independen. Berikut tabel di bawah ini merupakan pemberitaan calon non-independen yang ikut dalam pemilihan kepala daerah.

BAB VI

PENUTUP

6. 1. Kesimpulan

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka :

1. *Frame* yang ditemukan dalam pemberitaan Harian Padang Ekspres, yaitu calon independen berpeluang dalam pilkada. Melalui *frame* tersebut dapat disimpulkan bahwa Harian Padang Ekspres mengkonstruksikan pemberitaan calon independen dalam pilkada tahun 2008 di Sumatera Barat pasca keputusan MK yaitu dengan adanya aturan calon independen boleh ikut dalam pemilihan Kepala Daerah, maka keberadaan calon independen merupakan warna baru dan bukti wujud kian berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia. Harian Padang Ekspres mempresentasikan bahwa calon independen berpeluang dalam pilkada sebagai akibat dari kejenuhan dan kekecewaan masyarakat akan kinerja parpol selama ini. Parpol dalam permasalahan ini dipresentasikan sebagai pihak yang cenderung negatif, karena Harian Padang Ekspres lebih menyorot kepada kinerja parpol selama ini yang mengecewakan dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar utama dalam demokrasi. Sedangkan dukungan ditujukan oleh Harian Padang Ekspres dengan melekatkan nilai moral positif terhadap keberadaan calon independen yang merupakan warna baru dan bukti wujud kian berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia.

2. *Frame* yang ditemukan dalam pemberitaan Harian Singgalang, terdiri dari dua *frame*. *Frame* pertama yaitu calon independen berpeluang dalam pilkada. Melalui *frame* tersebut dapat disimpulkan, bahwa Harian Singgalang mengkonstruksikan pemberitaan calon independen dalam pilkada tahun 2008 di Sumatera Barat pasca keputusan MK dengan adanya aturan calon independen boleh ikut dalam pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian keberadaan calon independen merupakan warna baru dan bukti wujud kian berkembangnya Sistem Demokrasi di Indonesia. Sedangkan *frame* kedua meskipun UU membolehkan, peluang calon independen sangat berat. Melalui *frame* tersebut dapat disimpulkan, bahwa Harian Singgalang mengkonstruksikan pemberitaan calon independen dalam Pilkada tahun 2008 di Sumatera Barat pasca keputusan MK yaitu meskipun keberadaan calon independen merupakan warna baru dan bukti wujud kian berkembangnya Sistem Demokrasi di Indonesia, tapi diperlukan aturan lebih lanjut tentang calon independen untuk mengisi kekosongan aturan hukum. Dengan bentuk pemingkakan diatas, tampak bahwa Harian Singgalang memposisikan dirinya pada suatu keadaan yang memperlihatkan netralitas pemberitaan tentang calon independen dalam pilkada tahun 2008 di Sumatera Barat pasca keputusan MK, namun netralitas ini berada pada *frame* yang berbeda. Hal ini terlihat dari tindakan Harian Singgalang yang mengkritisi parpol. Harian Singgalang melekatkan nilai moral negatif yang tertuju pada kekecewaan dan kejenuhan masyarakat akan kinerja parpol selama ini yang menyebabkan calon independen berpeluang dalam pilkada.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Chilcote, Ronald H. 2004. *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Varma, SP. 2001. *Teori Politik Modren*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nimmo, Dan. 2002. *Komunikasi Politik Komunikator*. Jakarta : PT:Remaja Rosdakarya
- Abidin, Wikrama Iryans. 2005. *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta : PT : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sobur, Alex. 2002. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana Analisis Semiotik, Analisis Framing*. Bandung : Remaja Rosada Karya
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing : Kontruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta : LKiS
- Maswadi rauf ,Mappa Nasrun. 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Nuruddin. 2005. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mc Quail, Dennis. 1989. *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta : Erlangga.